

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amari, M. (2013). *Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Arief, B. N. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta Semarang.
- Ashiddiqie, J. (2005). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Diantha, I. M. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Effendi, T. (2019). *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muzammil, H. A. (2020). *Korupsi Perilaku Hukum Menyimpang*. Surabaya: Untag Surabaya Press.
- Qordharwi, Y. (1997). *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Bandung: Armico.
- Subekti, R. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2020. (2020). *Laporan Tahunan KPK 2020*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Tinggi, T. P. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Wiyono, R. (2008). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

### **Jurnal**

Mahardika, A. G. (2020). Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 264-284.

Sudirman, A. (2015). Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal MMH*, 317.

Yanto, O. (2017). *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 49-56.

### **Website**

Aji Prasetyo. (2021, Februari 25). *Begini Kronologis Mensos Juliari Minta Fee Rp 10 Ribu Paket Sembako Bansos*. Retrieved from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6037336f69e89/begini-kronologis-mensos-juliari-minta-fee-rp10-ribu-paket-sembako-bansos/?page=2>

CNN Indonesia. (2020, Desember 6). *Berhitung Anggaran Bansos Corona usai Mensos jadi Tersangka*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201206075413-532-578510/berhitung-anggaran-bansos-corona-usai-mensos-jadi-tersangka>

CNN Indonesia. (2020, Desember 6). *Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>

CNN Indonesia. (2020, Juni 23). *MK Tolak Uji Materi Perppu Corona Jokowi*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200623122815-12-516394/mk-tolak-uji-materi-perppu-corona-jokowi>

- CNN Indonesia. (2021, April 21). *Juliari Hadapi Sidang Perdana Dugaan Korupsi Bansos Hari Ini*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210421061412-12-632546/juliari-hadapi-sidang-perdana-dugaan-korupsi-bansos-hari-ini>
- CNN Indonesia. (2021, April 21). *Juliari Tak Ajukan Eksepsi Atas Dakwaan Suap Bansos Rp32,4 M*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210421122840-12-632748/juliari-tak-ajukan-eksepsi-atas-dakwaan-suap-bansos-rp324-m>
- Flora Dianti. (2020, Juni 18). *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved from [hukumonline.com](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi): <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi>
- Johnson. (2021, Agustus 9). *What Is Corruption?* Retrieved from The Law Dictionary: <https://thelawdictionary.org/corruption/>
- Korupsi, K. P. (2021, Juni 30). *Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan*. Retrieved from Pusat Edukasi Antikorupsi: <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/benturan-kepentingan-dalam-pengadaan>
- Thea Fathanah Arbar. (2020, Agustus 31). *42 Negara Ekonominya Dihancurkan Covid-19, Resesi Itu Nyata!* Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200831070523-4-183144/42-negara-ekonominya-dihancurkan-covid-19-resesi-itu-nyata>
- Tri Jata Ayu Pramesti. (2015, Januari 22). *Hukuman Tambahan Bagi Koruptor yang Tidak Membayar Uang Pengganti*. Retrieved from Hukumonline: [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54bf044fdb1c0/hukuman-tambahan-bagi-koruptor-yang-tidak-membayar-uang-pengganti/#:~:text=Pidana%20tambahan%20yang%20terdapat%20dalam,\(1\)%20UU%20Pemberantasan%20Tipikor%3A&text=b.%20pembayaran%20uang%20pen](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54bf044fdb1c0/hukuman-tambahan-bagi-koruptor-yang-tidak-membayar-uang-pengganti/#:~:text=Pidana%20tambahan%20yang%20terdapat%20dalam,(1)%20UU%20Pemberantasan%20Tipikor%3A&text=b.%20pembayaran%20uang%20pen)